

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Efek Malaysia (BEM). Tahun penelitian yakni mencakup data perusahaan pada tahun 2013-2015. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 30 (Indonesia) dan 75 (Malaysia) perusahaan perkebunan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Adapun rincian pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Prosedur Pemilihan Sampel di Indonesia**

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Total
1.	Perusahaan perkebunan yang <i>list</i> di BEI	13	14	16	<b>43</b>
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan <i>CSR</i> dalam laporan keuangannya secara berturut-turut	(0)	(1)	(3)	<b>(4)</b>
3.	<b>Total perusahaan yang dijadikan sampel</b>	13	13	13	<b>39</b>
4.	<i>Data outlier</i>	(3)	(3)	(3)	<b>(9)</b>
<b>Total <i>sample</i> perusahaan yang diteliti</b>		10	10	10	<b>30</b>
Sumber: hasil pengolahan data					

Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 13 perusahaan, dengan 3 tahun penelitian maka total *sample* yang diteliti sebanyak 39. Ditemukan data yang *outlayer* sebanyak 3 *sample* per tahunnya, sehingga *sample* pertahun yang diteliti sebanyak 10 perusahaan. Dalam waktu 3 tahun, total *sample* yang diteliti sebanyak 30.

**Tabel 4.2**  
**Prosedur Pemilihan *Sample* di Malaysia**

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Total
1.	Perusahaan perkebunan yang <i>listed</i> di BEM	37	39	39	<b>115</b>
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan <i>CSR</i> dalam laporan keuangannya secara berturut-turut	(11)	(13)	(13)	<b>(37)</b>
3.	<b>Total perusahaan yang dijadikan sampel</b>	26	26	26	<b>78</b>
4.	Data <i>outlier</i>	(1)	(1)	(1)	<b>(3)</b>
<b>Total <i>sample</i> perusahaan yang diteliti</b>		25	25	25	<b>75</b>
Sumber: hasil pengolahan data					

Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 26 perusahaan, dengan 3 tahun penelitian maka total *sample* yang diteliti sebanyak 78. Ditemukan data yang *outlier* sebanyak 1 *sample* per tahunnya, sehingga *sample* pertahun yang diteliti sebanyak 25 perusahaan. Dalam waktu 3 tahun, total *sample* yang diteliti sebanyak 75.

## **B. Uji Kualitas dan Instrumen Data**

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis Statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menyajikan jumlah data, nilai minimum (min), nilai maksimum (max), nilai rata-rata (*mean*)

dan simpangan baku (*standar deviation*) dari variabel independen dan variabel dependen.

Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.

**Tabel 4.3**  
**Statistik Deskriptif**  
**Indonesia**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EDI	30	,03	,24	,1290	,05956
UDK	30	3,00	9,00	5,1333	1,87052
PDKI	30	,25	,56	0,3894	0,08226
LBPD	30	,00	1,00	,7667	,43018
JRDK	30	2,00	12,00	4,6000	1,94049
Valid N (listwise)					

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengamatan dalam penelitian di Indonesia sebanyak 30 sampel, adapun hasil statistik deskriptif sebagai berikut: variabel *environmental disclosure* (EDI) memiliki nilai minimum sebesar 0,03 yang artinya tingkat *environmental disclosure* diungkapkan paling sedikit 0,03 kali dari perusahaan di Indonesia; nilai maksimum sebesar 0,24 yang berarti tingkat *environmental disclosure* diungkapkan paling banyak sebanyak 0,24 kali dari perusahaan di Indonesia, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1290 yang artinya rata-rata pengungkapan *environmental disclosure* di Indonesia yaitu 0,1290. Serta simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,05956.

Variabel ukuran dewan komisaris (UDK) memiliki nilai minimum sebesar 3,00 yang artinya jumlah minimal dewan komisaris untuk perusahaan

yang ada di Indonesia adalah sebanyak 3 orang; nilai maksimum sebesar 9,00 yang artinya jumlah maksimal dewan komisaris untuk perusahaan yang ada di Indonesia adalah sebanyak 9 orang; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5,1333 yang artinya rata-rata jumlah dewan komisaris untuk perusahaan yang ada di Indonesia adalah sebanyak 5 orang; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 1,87052.

Variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) memiliki nilai minimum sebesar 0,25 yang artinya proporsi minimal dewan komisaris untuk perusahaan yang ada di Indonesia adalah sebesar 25% dari total keseluruhan jumlah dewan komisaris; nilai maksimum sebesar 0,56 yang artinya proporsi maksimal dewan komisaris untuk perusahaan yang ada di Indonesia adalah sebesar 56% dari total keseluruhan jumlah dewan komisaris; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,3894 yang artinya rata-rata proporsi dewan komisaris untuk perusahaan yang ada di Indonesia adalah sebesar 39% dari total keseluruhan jumlah dewan komisaris; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,08226.

Variabel latar belakang pendidikan dewan komisaris (LBPD) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang artinya latar belakang pendidikan presiden komisaris yaitu ekonomi dan bisnis; nilai maksimum sebesar 1,00 yang artinya latar belakang pendidikan presiden komisaris yaitu bukan ekonomi dan bisnis. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,7667 yang artinya rata-rata latar belakang pendidikan presiden komisaris pada perusahaan di Indonesia sebesar 76% yang

artinya didominasi oleh presiden komisaris yang berlatar belakang di luar ekonomi dan bisnis; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,43018.

Variabel jumlah rapat dewan komisaris (JRDK) memiliki nilai minimum sebesar 2,00 yang artinya frekuensi minimal rapat dewan komisaris untuk perusahaan di Indonesia adalah sebesar 2 kali selama 1 periode perusahaan; nilai maksimum sebesar 12,00 yang artinya frekuensi maksimal rapat dewan komisaris untuk perusahaan di Indonesia adalah sebanyak 12 kali selama 1 periode perusahaan; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,6000 yang artinya rata-rata frekuensi rapat perusahaan di Indonesia yaitu 4 kali selama 1 periode perusahaan; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 1,94049.

**Tabel 4.4**  
**Statistik Deskriptif**  
**Malaysia**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EDI	75	,03	,35	,1608	,09340
UDK	75	4,00	12,00	7,4800	2,33284
PDKI	75	,25	1,00	,4870	,15628
LBPD	75	,00	1,00	0,6267	,48695
JRDK	75	2,00	19,00	5,4933	2,62201
Valid N (listwise)					

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengamatan dalam penelitian di Indonesia sebanyak 75 sampel, adapun hasil statistik deskriptif sebagai berikut: variabel *environmental disclosure* (EDI) memiliki nilai minimum sebesar 0,03 yang artinya tingkat *environmental disclosure* diungkapkan paling sedikit 0,03 kali dari perusahaan di Malaysia; nilai maksimum sebesar 0,35 yang berarti

tingkat *environmental disclosure* diungkapkan paling banyak sebanyak 0,35 kali dari perusahaan di Malaysia, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1608 yang artinya rata-rata pengungkapan *environmental disclosure* di Malaysia yaitu 0,1608. Serta simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,05956.

Variabel ukuran dewan komisaris (UDK) memiliki nilai minimum sebesar 4,00 yang artinya jumlah minimal dewan komisaris untuk perusahaan yang ada di Malaysia adalah sebanyak 4 orang; nilai maksimum sebesar 12,00 yang artinya jumlah maksimal dewan komisaris untuk perusahaan yang ada di Malaysia adalah sebanyak 12 orang; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 7,4800 yang artinya rata-rata jumlah dewan komisaris untuk perusahaan yang ada di Malaysia adalah sebanyak 7 orang; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 2,33284.

Variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) memiliki nilai minimum sebesar 0,25 yang artinya proporsi minimal dewan komisaris untuk perusahaan yang ada di Malaysia adalah sebesar 25% dari total keseluruhan jumlah dewan komisaris; nilai maksimum sebesar 1,00 yang artinya proporsi maksimal dewan komisaris untuk perusahaan yang ada di Malaysia adalah sebesar 100% dari total keseluruhan jumlah dewan komisaris; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4870 yang artinya rata-rata proporsi dewan komisaris untuk perusahaan yang ada di Malaysia adalah sebesar 48% dari total keseluruhan jumlah dewan komisaris; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,08226.

Variabel latar belakang pendidikan dewan komisaris (LBPD) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang artinya latar belakang pendidikan presiden komisaris yaitu ekonomi dan bisnis; nilai maksimum sebesar 1,00 yang artinya latar belakang pendidikan presiden komisaris yaitu bukan ekonomi dan bisnis. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,6267 yang artinya rata-rata latar belakang pendidikan presiden komisaris pada perusahaan di Malaysia sebesar 62% yang artinya didominasi oleh presiden komisaris yang berlatar belakang di luar ekonomi dan bisnis; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,43018.

Variabel jumlah rapat dewan komisaris (JRDK) memiliki nilai minimum sebesar 2,00 yang artinya frekuensi minimal rapat dewan komisaris untuk perusahaan di Malaysia adalah sebesar 2 kali selama 1 periode perusahaan; nilai maksimum sebesar 19,00 yang artinya frekuensi maksimal rapat dewan komisaris untuk perusahaan di Malaysia adalah sebanyak 19 kali selama 1 periode perusahaan; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5,4933 yang artinya rata-rata frekuensi rapat perusahaan di Malaysia yaitu 5 kali selama 1 periode perusahaan; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 1,94049.

## C. Analisis Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian dalam regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian uji normalitas pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6.

**Tabel 4.5**  
**Uji Normalitas**  
**Indonesia**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04106780
Most Extreme Differences	Absolute	,127
	Positive	,127
	Negative	-,078
Kolmogorov-Smirnov Z		,698
Asymp. Sig. (2-tailed)		,715

Berdasarkan Tabel 4.5 didapatkan hasil bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar  $0,715 > \alpha (0,05)$ . Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan menggunakan *sample* dari perusahaan Indonesia berdistribusi normal.

**Tabel 4.6**  
**Uji Normalitas**  
**Malaysia**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08944244
Most Extreme Differences	Absolute	,148
	Positive	,148
	Negative	-,087
Kolmogorov-Smirnov Z		1,279
Asymp. Sig. (2-tailed)		,076

Berdasarkan Tabel 4.5 didapatkan hasil bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar  $0,076 > \alpha (0,05)$ . Jadi, dapat disimpulkan data pada



penelitian dengan menggunakan *sample* dari perusahaan Indonesia berdistribusi normal.

### b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah antara variabel independen masing-masing variabel saling memberi pengaruh dalam model regresi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *Durbin Watson*. Model yang bebas autokorelasi adalah model yang nilai  $d_t$ -nya lebih besar dari  $d_U$  dan nilai  $d_t$ -nya lebih kecil dari  $4-d_U$  dengan kata lain  $d_U < d_t < 4-d_U$  (Ghozali, 2013). Nilai  $d_U$  diperoleh dari tabel pembandingan.

Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8.

**Tabel 4.7**  
**Uji Autokorelasi**  
*Durbin-Watson*  
 Indonesia  
 Model Summary<sup>b</sup>

Model	Durbin-Watson
1	1,354

a Predictors: (Constant), UDK, PDKI, LBPD, JRDK

b Dependent Variable: EDI

Berdasarkan Tabel 4.7 didapatkan hasil bahwa nilai DW sebesar 1,354. Nilai antara  $d_U < d_W < 4-d_U$ , model Indonesia  $1,1426 < 1,354 < 2,2614$  menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan *sample* dari perusahaan Indonesia tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 4.8**  
**Uji Autokorelasi**  
*Durbin-Watson*  
**Malaysia**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1,578

a Predictors: (Constant), UDK,PDKI,LBPD,JRDK

b Dependent Variable: EDI

Berdasarkan Tabel 4.8 didapatkan hasil bahwa nilai DW sebesar 1,578. Nilai antara  $dU < dW < 4-dU$ , model Malaysia  $1,5151 < 1,578 < 2,261$  menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan *sample* dari perusahaan Malaysia tidak terjadi autokolerasi.

### c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas dalam penelitian dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10.

**Tabel 4.9**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Indonesia**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
UDK	,169	5,908
PDKI	,172	5,830
LBPD	,916	1,092
JRDK	,946	1,057

a Dependent Variable: EDI

Berdasarkan Tabel 4.9 didapatkan hasil bahwa VIF masing-masing variabel  $\leq 10$ . Ukuran Dewan Komisaris (UDK) sebesar 5,908; Proporsi Dewan Komisari Independen (PDKI) sebesar 5,830; Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBPD) sebesar 1,092; Jumlah Rapat Dewan Komisaris (JRDK) 1,057. Sedangkan nilai Tolerance masing-masing  $> 0.10$ . Ukuran Dewan Komisaris (UDK) sebesar 0,169; Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) sebesar 0,172; Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBPD) sebesar 0,916; Jumlah Rapat Dewan Komisaris (JRDK) 0,946. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan *sample* perusahaan Indonesia tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4.10**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Malaysia**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
UDK	,690	1,449
PDKI	,599	1,670
LBPD	,930	1,076
JRDK	,849	1,178

a Dependent Variable: EDI

Berdasarkan Tabel 4.9 didapatkan hasil bahwa VIF masing-masing variabel  $\leq 10$ . Ukuran Dewan Komisaris (UDK) sebesar 1,449; Proporsi Dewan Komisari Independen (PDKI) sebesar 1,670; Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBPD) sebesar 1,076; Jumlah Rapat Dewan Komisaris (JRDK) 1,178. Sedangkan nilai Tolerance masing-masing  $> 0.10$ .

Ukuran Dewan Komisaris (UDK) sebesar 0,690; Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) sebesar 0,599; Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBPD) sebesar 0,930; Jumlah Rapat Dewan Komisaris (JRDK) 0,849. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian dengan *sample* perusahaan Malaysia tidak terjadi multikolinearitas.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12.

**Tabel 4.11**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**Indonesia**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Sig.
1	(Constant)	,000
	UDK	,655
	PDKI	,702
	LBPD	,755
	JRDK	,306

Berdasarkan Tabel 4.11 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Ukuran Dewan Komisaris (UDK) sebesar 0,655; Proporsi Dewan Komisari Independen (PDKI) sebesar 0,702; Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBPD) sebesar 0,755; Jumlah Rapat Dewan Komisaris

(JRDK) 0,306. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Indonesia tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.12**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**Malaysia**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Sig.
1 (Constant)	,000
UDK	,880
PDKI	,465
LBPD	,837
JRDK	,824

Berdasarkan Tabel 4.12 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Ukuran Dewan Komisaris (UDK) sebesar 0,880; Proporsi Dewan Komisari Independen (PDKI) sebesar 0,465; Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBPD) sebesar 0,837; Jumlah Rapat Dewan Komisaris (JRDK) 0,824. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Indonesia tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)**

##### **1. Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.13 dan Tabel 14.

**Tabel 4.13**  
**Uji Koefisien Determinasi**  
**Indonesia**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,724 <sup>a</sup>	,525	,448	,04423

a Predictors: (Constant), UDK, PDKI, LBPD, JRDK

b Dependent Variable: EDI

Berdasarkan tabel 4.13 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) adalah 0,448 atau 44,8%, hal ini menunjukkan bahwa *environmental disclosure* di Indonesia sebesar 44,8% oleh variabel ukuran dewan komisaris (UDK), proporsi dewan komisaris independen (PDKI), latar belakang pendidikan dewan komisaris (LBPD), dan jumlah rapat dewan komisaris (JRDK). Sedangkan sisanya 55,2% (100%-44,8%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

**Tabel 4.14**  
**Uji Koefisien Determinasi**  
**Malaysia**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,288 <sup>a</sup>	,083	,031	,09196

a Predictors: (Constant), UDK, PDKI, LBPD, JRDK

b Dependent Variable: EDI

Berdasarkan Tabel 4.14 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) adalah 0,031 atau 3,1%, hal ini menunjukkan bahwa *environmental disclosure* di Malaysia sebesar 3,1% oleh variabel ukuran dewan komisaris (UDK), proporsi dewan komisaris independen

(PDKI), latar belakang pendidikan dewan komisaris (LBPDI), dan jumlah rapat dewan komisaris (JRDK). Sedangkan sisanya 96,9% (100%-3,1%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

## 2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikan simultan (Uji F) bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Hasil uji signifikan simultan (Uji F) ditunjukkan pada Tabel 4.15 dan Tabel 4.16.

**Tabel 4.15**  
**Uji Signifikan Simultan (Uji F)**  
**Indonesia**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,054	4	,013	6,895	,001 <sup>a</sup>
	Residual	,049	25	,002		
	Total	,103	29			

a Predictors: (Constant), UDK, PDKI, LBPDI, JRDK

b Dependent Variable: EDI

Berdasarkan Tabel 4.15 didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar dengan nilai signifikan sebesar  $0,001 < \alpha (0,05)$ . Jadi, variabel independen (ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris) berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (*environmental disclosure*).

**Tabel 4.16**  
**Uji Signifikan Simultan (Uji F)**  
**Malaysia**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,081	4	,020	2,511	,049 <sup>a</sup>
	Residual	,565	70	,008		
	Total	,646	74			

a Predictors: (Constant), UDK, PDKI, LBPD, JRDK

b Dependent Variable: EDI

Berdasarkan Tabel 4.16 didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar dengan nilai signifikan sebesar  $0,049 < \alpha (0,05)$ . Jadi, variabel independen (ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris) berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (*environmental disclosure*).

### 3. Uji Parsial (Uji *t*)

Uji parsial (Uji *t*) bertujuan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Hasil uji parsial (Uji *t*) dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.17 dan Tabel 4.18.



**Tabel 4.17**  
**Uji Parsial (Uji *t*)**  
**Indonesia**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,038	,038		-,989	,332
	UDK	,052	,011	1,636	4,881	,000
	PDKI	-,073	,019	-1,282	-3,849	,001
	LBPD	,026	,020	,187	1,294	,207
	JRDK	,007	,004	,212	1,498	,147

a Dependent Variable: EDI

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.17 dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:

$$\text{EDI} = -,038 + 0,52(\text{UDK}) - 0,73(\text{PDKI}) + 0,026(\text{LBPD}) + 0,007(\text{JRDK}) + e$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian :

a. Ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan ukuran dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,052, dengan signifikansi sebesar  $0,00 < \alpha (0,05)$  sehingga ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_{1a}$ ) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **diterima**.

b. Proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,073 dengan signifikansi sebesar  $0,001 < \alpha (0,05)$  sehingga proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_{2a}$ ) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

c. Latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan latar belakang pendidikan dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,026 dengan signifikansi sebesar  $0,207 > \alpha (0,05)$  sehingga latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_{3a}$ ) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

d. Jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar

0,007 dengan signifikansi sebesar  $0,147 > \alpha (0,05)$  sehingga jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_{4a}$ ) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

**Tabel 4.18**  
**Uji Parsial (Uji  $t$ )**  
**Malaysia**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	$t$	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,121	,043		2,828	,006
	UDK	-,002	,006	-,041	-,297	,768
	PDKI	,018	,012	,224	1,514	,135
	LBPD	,031	,023	,162	1,361	,178
	JRDK	-,006	,004	-,156	-1,253	,214

a Dependent Variable: EDI

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.18 dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:

$$\text{EDI} = 0,121 - 0,002(\text{UDK}) + 0,018(\text{PDKI}) + 0,031(\text{LBPD}) - 0,006(\text{JRDK}) + e$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian :

a. Ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan ukuran dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,002, dengan signifikansi sebesar  $0,768 > \alpha (0,05)$  sehingga ukuran dewan komisaris

tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_{1a}$ ) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

b. Proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,18 dengan signifikansi sebesar  $0,135 > \alpha (0,05)$  sehingga proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_{2a}$ ) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

c. Latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan latar belakang pendidikan dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar 0,031 dengan signifikansi sebesar  $0,178 > \alpha (0,05)$  sehingga latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_{3a}$ ) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris

berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

d. Jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,004 dengan signifikansi sebesar  $0,214 > \alpha (0,05)$  sehingga jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_{4a}$ ) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

#### 4. Independent Sample t-test

**TABEL 4.19**  
**Uji Beda *t***  
**Indonesia-Malaysia**  
***Independent Samples t-test***

	Levene's Test for Equality of Variances		<i>t</i> -test for Equality of Means		
	F	Sig.	<i>t</i>	df	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed	9,438	,003	-2,052	101	,043
Equal variances not assumed			-2,559	80,695	,012

Berdasarkan Tabel 4.19 didapatkan hasil bahwa nilai F hasil *Levene's test for equality of variance* pada ukuran perusahaan sebesar 9,438 dengan signifikan 0,043 karena signifikan  $< 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa

kedua negara tersebut (Indonesia dan Malaysia) memiliki perbedaan *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis kelima ( $H_{5a}$ ) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan *environmental disclosure* antara Indonesia dan Malaysia dinyatakan **diterima**.

#### 5. Chow test

$$F = \frac{(RSSr - RSSur)/k}{(RSSur)/(n1 + n2 - 2k)}$$

$$RSSur = 0,565 + 0,049 = 0,614$$

$$RSSr = 0,672$$

$$n = 105$$

$$k = 4$$

$$F = \frac{(0,672 - 0,614)/4}{(0,614)/(98)}$$

$$F = \frac{0,0185}{0,006} = 3,08$$

$$F \text{ hitung} = 3,08$$

$$F \text{ tabel} = 2,69$$

$$F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$$

Hasil *Chow test* menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 3,08 dan F tabel sebesar 2,69 yang berarti pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure* antara Indonesia dan Malaysia memang berbeda. Dengan demikian hipotesis kelima ( $H_{5b}$ ) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat

kepatuhan *environmental disclosure* antara Indonesia dan Malaysia **diterima.**

## **E. Pembahasan (Interpretasi)**

### **a. Hubungan ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.**

Dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam *Corporate Governance*, hal ini tidak terlepas dari tugas utama dewan komisaris yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan mengevaluasi setiap kebijakan dewan direksi baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan terhadap suatu kebijakan yang akan/telah dikeluarkan.

Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure* yang berarti hasil dari penelitian menerima hipotesis pertama ( $H_{1a}$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Frendy *et al* (2011) serta Sun *et al* (2010) menemukan terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan *Environmental Disclosure*.

Berpengaruhnya variabel ukuran dewan komisaris dalam penelitian dikarenakan dengan semakin banyaknya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan akan membuat perusahaan menjadi lebih tertib dalam pengungkapan. Hal ini juga ditunjang dengan semakin banyaknya evaluasi setiap kebijakan dewan direksi baik yang akan dilaksanakan ataupun yang akan dikeluarkan. tugas dan tanggung jawab dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan

*Good Corporate Governance* sesuai aturan serta mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan efektif.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung teori legitimasi, dimana menurut teori legitimasi, perusahaan mempunyai ikatan kontrak dengan masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial akan dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar dan selanjutnya akan mengamankan perusahaan dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen akan senantiasa menselaraskan nilai perusahaan kepada nilai masyarakat agar tidak membuat perusahaan kehilangan legitimasinya.

Berbeda halnya dengan Hasil penelitian di Malaysia menunjukkan ukuran dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *environmental disclosure* yang berarti hasil dari penelitian menolak hipotesis pertama ( $H_{1b}$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Effendi *et al* (2012) yang menemukan pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris dengan *environmental disclosure*.

Tidak berpengaruhnya variabel ukuran dewan komisaris dalam penelitian dugaan dari peneliti hal ini dikarenakan tidak adanya kepentingan pasti dari dewan komisaris yang berhubungan dengan pengungkapan lingkungan, dengan demikian semakin banyaknya jumlah dewan komisaris



tidak berarti apapun disebabkan sedikitnya atau hanya segelintir saja yang memperhatikan aspek lingkungan. Sehingga dari banyaknya sampel perusahaan pada penelitian, tidak ditemukan satu pun perusahaan yang berfokus pada pengungkapan lingkungan atau *environmental disclosure*. Selain itu, jumlah dewan komisaris yang terlalu besar akan lebih sulit dalam proses pengambilan keputusan, banyaknya ide/fikiran masing-masing dewan komisaris akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengambil satu kesimpulan sehingga kinerja menjadi kurang efektif.

**b. Hubungan proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure*.**

Komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan diharapkan mampu meminimalisasi adanya konflik keagenan yang terjadi di perusahaan. Peran komisaris bertindak sebagai *monitoring*, penasihat manajemen, dan pengawasan atas kebijakan manajemen. Dewan komisaris independen merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang mampu meningkatkan pengungkapan. Proporsi dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure* yang berarti hasil dari penelitian menolak hipotesis kedua ( $H_{2a}$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suhardjanto

dan Miranti (2008), Effendi *et al* (2012) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Environmental Disclosure*.

Sama halnya dengan hasil penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* yang berarti hasil dari penelitian yang dilakukan menolak hipotesis kedua ( $H_{2b}$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permatasari (2009), Khasanah (2012), Supriyono dkk (2014), Sulistyowati (2012) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*.

Tidak berpengaruhnya variabel proporsi dewan komisaris dalam penelitian dugaan dari peneliti karena Menurut Siregar (dalam Terzaghi, 2012), ketentuan minimum Komisaris Independen sebesar 30% mungkin belum cukup tinggi untuk mendapatkan dominasi kebijakan yang diambil oleh jajaran Dewan Komisaris. Seandainya saja pihak komisaris independen merupakan pihak yang mayoritas, maka mungkin dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya. Oleh karena itu, fungsinya sebagai pihak yang bertindak independen yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan tidak berjalan dengan baik, yang dapat berdampak pada kurangnya dorongan terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan lingkungan.

Lebih lanjut, Strandberg (dalam Handajani dkk, 2009) menyatakan bahwa dalam melakukan pengungkapan lingkungan tidak hanya didorong oleh jumlah atau proporsi Komisaris Independen yang hanya dianggap

penting saja, tetapi juga keahlian, pengetahuan, latar belakang, dan perbedaan kompetensi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada tingkat Dewan Komisaris dimana lingkungan dikaitkan.

**c. Hubungan latar belakang pendidikan presiden komisaris terhadap environmental disclosure**

Pengetahuan yang diperoleh presiden komisaris tentunya didasarkan pada latar belakang pendidikan, untuk mampu mengendalikan aktivitas bisnis perusahaan serta pengambilan keputusan strategis sebaiknya presiden komisaris mempunyai latar belakang ekonomi ataupun bisnis untuk menunjang kemampuan karena berkaitan secara langsung antara ilmu yang diperoleh dengan usaha yang dilakukan.

Hasil penelitian di Indonesia dan Malaysia menunjukkan latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis ketiga ( $H_{3a}$  dan  $H_{3b}$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Miranti (2008) yang mengatakan latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh dengan *Environmental Disclosure*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Ini dapat terjadi karena dalam penelitian ini hanya mendefinisikan latar belakang pendidikan secara spesifik pada bisnis dan ekonomi (keuangan), padahal

terdapat kemungkinan latar belakang pendidikan presiden komisaris sesuai dengan jenis usaha perusahaan yang dapat menunjang kelangsungan bisnis dan pengungkapan akan lingkungan perusahaan lebih diperlukan. Selain itu, adanya kebutuhan akan *soft skill* dalam menjalankan bisnis, sedangkan pendidikan yang diperoleh di bangku sekolah merupakan pendidikan *hard skill*. Penelitian dari *Harvard University* di Amerika Serikat mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% dengan *hard skill* dan sisanya 80% dengan *soft skill* (Nurudin, 2004).

**d. Hubungan jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure***

Dewan komisaris setidaknya mempunyai jadwal rutin untuk rapat dewan komisaris atau bisa juga dengan mengadakan jadwal rapat tambahan untuk melakukan konsolidasi, maka dengan ini akan mudah untuk mengetahui kesesuaian antara aktivitas atau operasi yang dilakukan perusahaan dengan strategi maupun kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Banyaknya jumlah rapat yang diadakan oleh dewan komisaris diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, sehingga pengungkapan atas informasi lingkungan diharapkan juga akan meningkat.

Hasil penelitian di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis keempat ( $H_{4a}$  dan  $H_{4b}$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Mizrawati (2009) dan Xie *et al* (2003) yang mengatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*.

Hasil ini menunjukkan bahwa peraturan yang ditetapkan *corporate governance guidelines* (2007) belum berjalan baik di Indonesia. Peraturan yang ada hanya dijalankan sebagaimana formalitas demi menjaga *image* perusahaan itu sendiri. Muntoro (2006) juga menyatakan jika hal ini terjadi kemungkinan karena rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris kurang efektif, dikarenakan adanya dominasi suara dari anggota Dewan Komisaris yang memungkinkan kepentingan pribadi atas kelompoknya sehingga mengesampingkan perusahaan.

#### **e. Perbedaan antara Indonesia dan Malaysia**

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan di Indonesia dan Malaysia pada pengungkapan CSR keduanya menggunakan *Global Reporting Initiatives* (GRI) 4 dengan 9 aspek dan 34 item. Adapun sembilan aspek utama itu yakni: material, air, transportasi, keanekaragaman hayati, energi, emisi dan limbah, ketaatan pada peraturan, produk dan jasa, serta keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Meskipun pada dasarnya menggunakan pedoman yang sama, akan tetapi terdapat peraturan tentang pengungkapan yang belum dilaksanakan dengan baik oleh beberapa perusahaan, hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran. Selain itu, *environmental disclosure* masih dianggap kurang penting bagi perusahaan.

Sebab, orientasi utama perusahaan tetaplah mencari laba sebanyak-banyaknya dan pengungkapan lingkungan menjadi terabaikan sehingga lebih mementingkan para stakeholders utamanya dalam hal perolehan laba perusahaan. Selain itu, terdapat perbedaan pengungkapan di Indonesia dan Malaysia apabila dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1290 yang artinya rata-rata pengungkapan environmental disclosure di Indonesia yaitu 0,1290. Berbeda halnya dengan tingkat pengungkapan lingkungan di Malaysia yang mana nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1608 yang artinya rata-rata pengungkapan environmental disclosure di Malaysia yaitu 0,1608. Hal ini menunjukkan tingkat pengungkapan lingkungan di Malaysia lebih tinggi dibandingkan tingkat pengungkapan lingkungan di Indonesia. Berdasarkan peringkat GRI Indonesia menempati peringkat 38, berbeda dengan Malaysia yang menempati posisi lebih di atas yakni peringkat 24.

**f. Perbedaan pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia**

Hasil *Chow test* menunjukkan adanya perbedaan pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini sesuai dengan Rikhana (2015) yang menyatakan terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pengungkapan antara Indonesia dan

Malaysia. Peraturan dan praktik tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor penyebab adanya perbedaan penerapan tata kelola perusahaan.

Dilihat dari konsep *corporate governance* antara Indonesia dan Malaysia juga berbeda, dimana Indonesia menggunakan konsep *two tier system* sedangkan Malaysia menggunakan *one tier system*. Perbedaan konsep ini dapat pula menyebabkan perbedaan pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Irawan (2015) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan di Indonesia dan Malaysia.

#### **F. Pembahasan hasil penelitian secara keseluruhan**

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif dan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*, sedangkan Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak dibuktikan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Ukuran Dewan Komisaris dinilai berpengaruh karena semakin banyaknya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan akan membuat perusahaan menjadi lebih tertib dalam pengungkapan dalam aspek lingkungan. Hal ini juga ditunjang dengan semakin banyaknya evaluasi setiap kebijakan dewan direksi baik yang akan dilaksanakan ataupun yang akan dikeluarkan. Sebagaimana tugas utama dan

tanggung jawab dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* sesuai aturan serta mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan efektif.

Hal tersebut tidak didukung dengan tidak berpengaruhnya variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *environmental disclosure* yang mana ketentuan minimum Komisaris Independen sebesar 30% mungkin belum cukup tinggi untuk mendapatkan dominasi kebijakan yang diambil oleh jajaran Dewan Komisaris. Seandainya saja pihak Komisaris Independen merupakan pihak yang mayoritas, maka mungkin dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya. Oleh karena itu, fungsinya sebagai pihak yang bertindak independen yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan tidak berjalan dengan baik, yang dapat berdampak pada kurangnya dorongan terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Selain itu, dengan jumlah komisaris independen yang minoritas belum cukup mampu untuk pengambilan keputusan hal ini dikarenakan masih dominannya komisaris lain yang terafiliasi dengan internal perusahaan.

Sama halnya pada variabel Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang terbukti tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris tidak berpengaruh karena pada penelitian ini menjelaskan definisi latar belakang pendidikan hanya pada bidang ekonomi dan bisnis, seharusnya pendidikan presiden komisaris mungkin saja



sejalan dengan jenis usaha sehingga hal ini bisa meningkatkan produktivitas perusahaan karena sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Selain itu juga akan lebih memperhatikan aspek lingkungan karena lebih mengetahui lingkungan sekitar perusahaan.

Sedangkan Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak dibuktikan berpengaruh hal ini terjadi kemungkinan karena rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris kurang efektif, disebabkan adanya dominasi pendapat dari berbagai pihak yang diyakini latar belakang pendidikan presiden komisaris mempunyai peranan yang cukup penting karena berkaitan dengan pengetahuan dari jenis usaha sehingga pengungkapan lingkungan terabaikan, dan lebih mementingkan kepentingan lain utamanya dalam hal kelangsungan bisnis (berorientasi pada profit).

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan di Indonesia dan Malaysia pada pengungkapan CSR keduanya menggunakan *Global Reporting Initiatives* (GRI) 4 dengan 9 aspek dan 34 item. Adapun sembilan aspek utama itu yakni: material, air, transportasi, keanekaragaman hayati, energi, emisi dan limbah, ketaatan pada peraturan, produk dan jasa, serta keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Meskipun pada dasarnya menggunakan pedoman yang sama, akan tetapi terdapat peraturan tentang pengungkapan yang belum dilaksanakan dengan baik oleh beberapa perusahaan, hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran. Selain itu, *environmental disclosure* masih dianggap kurang penting bagi perusahaan.

Sebab, orientasi utama perusahaan tetaplah mencari laba sebanyak-banyaknya dan pengungkapan lingkungan menjadi terabaikan sehingga lebih mementingkan para stakeholders utamanya dalam hal perolehan laba perusahaan.

Sedangkan Mekanisme *Corporate Governance* terbukti berbeda di Indonesia dan Malaysia hal ini dikarenakan perbedaan konsep *corporate governance* antara Indonesia dan Malaysia, dimana Indonesia menggunakan konsep *two tier system* sedangkan Malaysia menggunakan *one tier system*. Di Indonesia antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perusahaan merupakan orang yang berbeda, artinya harus ada kesinambungan diantara keduanya untuk menentukan arah kebijakan pada perusahaan sehingga hal ini memungkinkan adanya konflik kepentingan. Berbeda halnya dengan yang ada di Malaysia, yang mana antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perusahaan merupakan orang yang sama, artinya pengambilan keputusan mampu berjalan dengan cepat tanpa adanya unsur kepentingan diantara pimpinan perusahaan. Perbedaan konsep ini dapat pula menyebabkan perbedaan pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.

**TABEL 4.20**  
**RINGKASAN SELURUH HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS**

<b>Kode</b>	<b>Hipotesis</b>	<b>Hasil</b>
<b>H<sub>1a</sub></b>	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> di Indonesia	<b>Diterima</b>
<b>H<sub>1b</sub></b>	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> di Malaysia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>2a</sub></b>	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> di Indonesia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>2b</sub></b>	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> di Malaysia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>3a</sub></b>	Latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> di Indonesia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>3b</sub></b>	Latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> di Malaysia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>4a</sub></b>	Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> di Indonesia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>4b</sub></b>	Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> di Malaysia	<b>Ditolak</b>
<b>H<sub>5a</sub></b>	Terdapat perbedaan secara signifikan <i>Environmental Disclosure</i> antara Indonesia dan Malaysia	<b>Diterima</b>
<b>H<sub>5b</sub></b>	Terdapat perbedaan pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris antara Indonesia dan Malaysia	<b>Diterima</b>